

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 1-15 APRIL 2024

■ **Nusantara**
DPD RI Pantau Pilpres Rusia

■ **Varia Senat** ■
Belajar Kepariwisataan,
Komite III DPD RI ke Yunani

■ **Sekretariat Jenderal**
Sekjen DPD RI Lantik 96 PPPK



UU DKJ DISAHKAN: NGAWUR PILKADA SATU PUTARAN

Komite II DPD RI ke Gresik untuk
Pengawasan Pelaksanaan UU Minerba

SCAN
ME!

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia

ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



9

772987

311004



SENAT UTAMA

4



- UU DKJ Disahkan:
Ngawur Pilkada Satu Putaran
- Senator Sylviana Murni Ingin Orang Betawi
Jadi Gubernur DKJ
- Senator Fahira Idris Harapkan:
UU DKJ Bisa Atasi Kemacetan di Jakarta
- Nama Jakarta berawal dari Kesultanan Banten Muslim

NUSANTARA

10

- DPD RI Pantau Pilpres Rusia
- Sultan Setuju DMO Sawit Berbasis Volume
Produksi
- Indonesia dan Rusia Sepakat Tingkatkan Kerja
Sama Antar Parlemen
- Mudik Lebaran 2024:
Fahira Optimis Berjalan Lancar
- Buka Bersama Senator Terpilih:
LaNyalla Sampaikan Upaya Penguatan DPD RI

VARIA SENAT

17

- Belajar Kepariwisata, Komite III DPD RI
ke Yunani
- Pariwisata Indonesia Butuh Komitmen
yang Jelas
- Temuan BPK RI Semester I Tahun 2023
- BAP Dorong Pengembalian Kerugian Negara
- Banyak Potensi Daerah Belum Dipatenkan

- Dalam RUU RPJPN 2025-2045
Komite IV Raker dengan Bappenas
- Gede Ngurah Ambara Putra Gantikan Arya
Wedakarna
- Komite II DPD RI ke Gresik untuk
Pengawasan Pelaksanaan UU Minerba

SEKRETARIAT JENDERAL

26

- Sekjen DPD RI Lantik 96 PPPK

GALERI

27



RENUNGAN RAMADHAN

28

- Alqur'an dan Memperbarui Paradigma Umat
Oleh Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A/Anggota DPD
RI asal DIY

WISATA

30

- Empat Destinasi Religi Menarik untuk Dikunjungi Saat
Lebaran

Four Interesting Religious Destinations to Visit During Eid





Menunggu Orang Betawi Jadi Gubernur

Dinamika politik Jakarta sering menarik perhatian, khususnya terkait representasi etnis dalam peran kunci seperti gubernur atau wakil gubernur. Orang Betawi, sebagai penduduk asli, memiliki peranan penting dalam Sejarah dan budaya ibukota, mendorong tuntutan untuk representasi yang lebih besar dalam kepemimpinan kota. Hal ini mencerminkan tidak hanya keinginan untuk representasi yang lebih kuat tetapi juga pengakuan atas kontribusi mereka dalam pembentukan identitas dan pembangunan Jakarta.

Sylviana Murni, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jakarta, mendukung agar peran gubernur masa depan di Jakarta mencakup representasi Betawi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Rano Karno, tokoh Betawi, pernah menjabat sebagai gubernur tetapi di Banten, yang menunjukkan representasi politik Betawi yang terbatas dalam lingkaran gubernur Jakarta. Situasi ini menegaskan aspirasi yang lebih luas untuk struktur tata kelola yang lebih inklusif, mencerminkan komposisi demografis Jakarta yang beragam, termasuk etnisitas, perspektif, dan wawasan komunitas.

Advokasi untuk keterlibatan Betawi dalam tata kelola melampaui sekedar pernyataan politik, mewakili dialog yang lebih besar mengenai representasi, demokrasi, dan tata kelola yang adil. Ini menekankan pentingnya pendekatan kritis dan terbuka dalam membentuk masa depan administrasi Jakarta yang inklusif dan beragam, mencerminkan lanskap sosial dan politik kota yang kompleks. **(* / Pemred)**

Waiting for a Betawi to Become Governor

The political dynamics of Jakarta often capture attention, particularly regarding ethnic representation in critical roles like governor or vice governor. The Betawi, as native inhabitants, play a crucial role in the capital's history and culture, prompting a call for greater representation in city leadership. This reflects not only a desire for enhanced representation but also recognition of their contributions to Jakarta's identity and development.

Sylviana Murni, a Regional Representative Council (DPD) member from Jakarta, advocates for future gubernatorial roles in Jakarta to include Betawi representation. Historical accounts reveal Rano Karno, a Betawi figure, served as governor in Banten, indicating the limited political representation of Betawi in Jakarta's gubernatorial sphere. This situation underscores the broader aspiration for a more inclusive governance structure that mirrors Jakarta's diverse demographic makeup, including ethnicity, perspectives, and community insights.

This advocacy for Betawi involvement in governance transcends mere political statement, representing a larger dialogue on representation, democracy, and equitable governance. It emphasizes the importance of critical and open-minded approaches to fostering an inclusive and diverse administrative future for Jakarta, reflecting the city's complex social and political landscape.

(* / Editor-in-Chief)



Monumen Nasional (Monas) adalah satu simbol Kota Jakarta. (Foto Grid.id)

UU DKJ DISAHKAN: NGAWUR PILKADA SATU PUTARAN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), menetapkan perubahan status Jakarta pasca-pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. UU ini menjamin pemilihan gubernur DKJ akan tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, namun hanya dalam satu putaran.

Keputusan ini mengundang protes dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Jakarta, Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly, kebijakan satu putaran pemilihan gubernur ini keliru. Ia berpendapat bahwa seharusnya aturan pemilihan kepala daerah bisa berlangsung dalam dua putaran, tergantung pada jumlah calon.

Lebih lanjut, Jimly menyinggung status khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, mempertanyakan kekhususan Jakarta dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Ia membandingkan potensi status khusus Jakarta dengan Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY), yang memiliki keistimewaan berbasis kerajaan.

Sementara itu, Feri Amsari, Pakar Hukum dari Universitas Andalas, mengomentari bahwa sistem pemilihan satu putaran dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Feri menyarankan bahwa gubernur yang terpilih melalui sistem satu putaran mungkin tidak mendapat dukungan mayoritas di DPRD, akibat koalisi politik yang minim.

Dengan pemberlakuan UU

DKJ, Jakarta memasuki fase baru dalam pemerintahannya, yang memerlukan penyesuaian terhadap mekanisme pemilihan gubernur dan status kekhususan sebagai mantan ibu kota negara. Pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi UU DKJ masih terus berlangsung untuk menentukan masa depan pemerintahan Jakarta. (*)

“

Aturan satu putaran pemilihan tidak seharusnya mengeliminasi opsi pemilihan dua putaran yang ada. Diskusi seharusnya berfokus pada apakah gubernur dipilih langsung oleh rakyat, oleh DPRD, atau diangkat oleh presiden.

”

Anggota DPD RI
Jimly Asshiddiqie

Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Senator Sylviana Murni Inginkan Orang Betawi Jadi Gubernur DKJ



Anggota DPD RI Sylviana Murni dan Hilmi Muhammad saat rapat kerja dengan Panja RUU DKJ, di Baleg DPR RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DKI Jakarta, Sylviana Murni, mengusulkan agar posisi Gubernur atau Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di masa depan melibatkan unsur

masyarakat Betawi.

Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ di Gedung Nusantara I DPR, Sylviana menyampaikan kriteria orang Betawi, mencakup mereka yang

memiliki keturunan Betawi ataupun yang telah berkontribusi dan berprestasi di Jakarta.

Mpok Sylvi, sapaan akrab Sylviana, mengutarakan ide mengkolaborasi nilai demokratis dengan kebutuhan meng-

harga komunitas Betawi di Jakarta. Ia mengambil contoh kebijakan di Papua, di mana terdapat kewajiban mengakomodir orang asli Papua (OAP) dalam repre-

sentasi politik.

“Semua partai politik yang menunjuk pasangan-pasangan calon untuk berjuang di Pilkada DKJ ini ada kewajiban semacam

kuota perempuan 20 persen. Tapi ini wajib wagubnya-kah, atau gubernurnya-kah harus dari unsur Betawi,” ujar Mpok Sylvi.



Ondel-Ondel merupakan salah satu ikon budaya yang paling terkenal di kalangan masyarakat Betawi. (Foto Ist)

Sylviana menekankan bahwa partai politik yang mengusung calon dalam Pilkada DKJ harus memastikan salah satu dari pasangan calonnya berasal dari unsur Betawi, mirip dengan kuota perempuan 20 persen. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan

bentuk penghargaan kepada masyarakat Betawi yang telah lama mendiami Jakarta.

RUU tentang Daerah Khusus Jakarta telah disahkan menjadi UU pada 28 Maret 2024, menandai perubahan status Jakarta menyusul pemindahan Ibu Kota Negara ke Kali-

mantan Timur. Sylviana Murni, yang juga mantan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, menegaskan pentingnya memperhatikan aspek keberagaman dan pengakuan terhadap masyarakat Betawi dalam struktur pemerintahan Jakarta yang baru. (*)

Senator Fahira Idris Harapkan:

UU DKJ BISA ATASI KEMACETAN DI JAKARTA

DPR RI telah meratifikasi Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang, mengatur tentang kawasan aglomerasi untuk mengatasi masalah urban seperti kemacetan dan banjir di Jakarta. UU DKJ ini bertujuan memfasilitasi penanganan tantangan perkotaan dengan meningkatkan koordinasi dan integrasi antara Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Fahira Idris, anggota DPD RI dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menyatakan harapan bahwa UU DKJ akan membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dengan mendorong pengembangan transportasi publik yang terintegrasi. Ini sesuai dengan visi yang tertuang dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, yang menargetkan pada tahun 2029, 60 persen pergerakan penduduk di wilayah Jabodetabek harus menggunakan transportasi publik.

“Dengan populasi yang mencapai lebih dari 30 juta jiwa, wilayah Jabodetabek telah menjadi salah satu aglomerasi terbesar di dunia. Ini menimbulkan ketergantungan yang signifikan pada pergerakan antarwilayah, dengan estimasi pergerakan harian mencapai jutaan trip,”



Ilustrasi kemacetan lalu lintas yang terjadi di ruas Jalan Sudirman Jakarta. (Foto Detik)

kata Fahira baru-baru ini.

Fahira mengungkapkan bahwa saat ini, pergerakan di Jabodetabek mencapai sekitar 88,2 juta trip per hari, dengan detail bahwa di Jakarta tercatat 21,2 juta trip, commuter mencapai 6,4 juta trip, dan pergerakan suburban sebanyak 60,6 juta trip per hari.

Namun, Fahira menyayangkan rendahnya penggunaan transportasi publik, dengan hanya sekitar 30 persen penduduk memanfaatkannya, sedangkan 70 persen lainnya masih bergantung pada kendaraan pribadi. Ini menyebabkan kemacetan yang berkelanjutan dan berdampak negatif pada ekonomi, lingkungan, dan produktivitas di wilayah Jabodetabek.

Fahira berharap adanya peningkatan dan penyamaan kualitas sistem transportasi publik di Jabodetabek de-

ngan Jakarta, agar dapat mendukung fungsi Jakarta sebagai kota global, dan kota-kota di sekitarnya dapat berkembang sebagai pusat perdagangan dan bisnis yang signifikan.

“Semoga, sistem transportasi publik di Jabodetabek bisa setara dengan yang ada di Jakarta, sehingga ke depan Jakarta bisa memainkan perannya sebagai kota global. Sementara kota-kota sekitarnya bisa berfungsi sebagai pusat perdagangan, kegiatan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global,” harap Fahira.

UU DKJ mendefinisikan kawasan aglomerasi meliputi Provinsi DKI, Kabupaten Bogor, Tangerang, Bekasi, Cianjur, serta Kota Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, sebagai langkah strategis dalam mengatasi tantangan perkotaan di wilayah ini. (*)

Nama Jakarta berawal dari Kesultanan Banten Muslim

Jakarta, ibu kota sekaligus kota terbesar di Indonesia, berdiri megah dengan sejarah yang kaya dan pelik. Berlokasi di estuari Sungai Ciliwung, di bagian barat laut Pulau Jawa, Jakarta merupakan pusat peradaban yang telah berlangsung sejak zaman purba. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Jakarta telah dihuni sejak abad ke-4 Masehi, berawal sebagai permukiman dan pelabuhan Hindu yang ramai.

Sepanjang sejarahnya, Jakarta telah menjadi saksi bisu berbagai peralihan kekuasaan. Mulai dari kejayaan Tarumanegara, sebuah kerajaan yang dipengaruhi oleh budaya India, hingga ke Kerajaan Sunda Hindu, Kesultanan Banten Muslim, dan kemudian di bawah pengaruh kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia yang merdeka.

Nama Jakarta sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan. Dikenal sebagai Sunda Kalapa di era Kerajaan Sunda, nama tersebut berubah menjadi Jayakarta, Djajakarta, atau Jacatra di masa Kesultanan Banten. Sejarah Jakarta dapat dibagi menjadi tiga era penting: Kota Tua Jakarta, yang berkembang antara 1619 dan 1799 di era VOC, dikenal dengan kehidupan per-



Kawasan Kota Tua Jakarta yang indah memesona. (Foto Aceh Network)

dagangannya yang dinamis. Kemudian, era 'Kota Baru' di selatan, yang berkembang antara 1809 dan 1942 setelah VOC bangkrut dan Belanda mengambil alih. Dan yang ketiga, era Jakarta modern, yang bermula sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, Jakarta dikenal sebagai Batavia, sebuah nama yang bertahan hingga era kemerdekaan. Periode ini menandai transisi Jakarta dari sebuah pusat perdagangan menjadi ibu kota negara yang penuh dengan dinamika sosial dan politik.

Kisah awal Jakarta juga tergambar dalam peninggalan bersejarah seperti Prasasti Tugu, yang ditemu-

kan di Jakarta Utara, mencatat keberadaan Jakarta sebagai bagian dari kerajaan Tarumanegara. Di bawah pemerintahan Raja Purnawarman pada tahun 397 Masehi, ibu kota Tarumanegara dipindahkan ke Sunda Pura, menandai babak baru dalam sejarah wilayah yang kini kita kenal sebagai Jakarta.

Transformasi Jakarta dari permukiman kuno menjadi metropolis modern adalah perjalanan yang mempesona, merefleksikan perpaduan antara tradisi yang kaya dan modernitas yang dinamis. Cerita Jakarta adalah cerita tentang pertumbuhan, perubahan, dan ketahanan, sebuah epik yang terus berlanjut hingga hari ini. (*/ Sumber: wp.com)



DPD RI Pantau Pilpres Rusia



Delegasi DPD RI yang menjadi pemantau Pilpres Rusia sedang menjawab pertanyaan pers setempat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sejumlah senator dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, turut serta sebagai pemantau internasional dalam Pemilu Presiden (Pilpres) Rusia yang berlangsung dari 15 hingga 17 Maret 2024 di Moskow. Delegasi Indonesia itu mengunjungi beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk TPS 2576 di Krylatskie, TPS 2616 di Partizanskaya, dan TPS 2654 di Mozhayskoe Shosse.

Darmansyah Husein, Ketua BKSP DPD RI, berpartisipasi dalam memberikan pandangan mengenai hasil awal Pilpres Rusia. Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, menyoroti peng-

gunaan teknologi canggih dalam pelaksanaan pemilu di Rusia, yang menurutnya meningkatkan akurasi dan kredibilitas hasil.

Nono Sampono mengungkapkan harapan agar Indonesia dapat mengadopsi teknologi pemilu serupa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih. Keikutsertaan delegasi DPD RI di Pilpres Rusia menandai pentingnya hubungan antara Indonesia dan Federasi Rusia, yang tidak hanya bersifat bisnis tetapi juga mencerminkan persahabatan antarnegara yang telah berlangsung selama 74 tahun.

Menurut Nono, hubungan

diplomasi yang terjalin sejak tahun 1950 antara kedua negara didasarkan pada tradisi persahabatan, kesetaraan, dan saling menghargai di berbagai bidang. Kehadiran observer internasional dalam Pilpres Rusia dianggap sebagai langkah positif untuk menjaga integritas, inklusivitas, dan transparansi proses demokrasi.

Delegasi DPD RI juga meliputi anggota seperti Senator Abdullah Puteh dari Aceh, Filep Wamafma dari Papua Barat, Adilla Azis dari Jawa Timur, dan Bambang Santoso dari Bali, menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung proses demokrasi yang berintegritas di tingkat internasional. (*)

Sultan Setuju DMO Sawit Berbasis Volume Produksi

Harga minyak sawit saat ini sangat rentan terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi realisasi ekspor minyak sawit. Hal ini menyebabkan masyarakat domestik harus menanggung beban volatilitas harga minyak goreng, khususnya ketika terjadi penurunan realisasi ekspor akibat volatilitas pasar global.

“Seperti yang terjadi saat ini, harga minyak goreng naik rata-rata 5 persen di banyak daerah. Ini tentu sangat mempengaruhi daya beli masyarakat dan mendorong kenaikan inflasi,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, dalam keterangan resminya pada Senin (26/3/2024).

Dengan alasan tersebut, senator dari Provinsi Bengkulu mendukung ide untuk mengubah basis penetapan *Domestic Market Obligation (DMO)* minyak sawit, dari yang sebelumnya berbasis realisasi ekspor menjadi berbasis produksi minyak sawit, sebuah gagasan yang diusulkan oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP).



(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Ilustrasi hamparan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.(Foto Sinar Mas Agribusiness)

Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Sultan berpendapat bahwa masyarakat Indonesia seharusnya dapat menikmati harga minyak goreng yang stabil, sesuai dengan hasil produksi sawit. Usulan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga bagi petani sawit mandiri di daerah.

Meskipun luas lahan perkebunan sawit di Indonesia terus meningkat, harga minyak goreng juga terus naik. Oleh karena itu, Sultan menegaskan

kan bahwa tata niaga minyak sawit atau *Crude Palm Oil (CPO)* harus dievaluasi secara menyeluruh.

Namun, Sultan juga menekankan bahwa usulan untuk DMO minyak sawit berbasis produksi ini harus diteliti secara detail agar tidak merugikan pendapatan petani sawit mandiri. Dia menekankan pentingnya stabilitas harga minyak goreng yang terjangkau serta peningkatan kesejahteraan petani sawit di daerah.

Sebelumnya, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengusulkan revisi kebijakan DMO minyak goreng dengan basis perhitungan volume produksi. Deputy III KSP, Edy Priyono, menyatakan bahwa aturan DMO minyak goreng saat ini, yang berbasis volume ekspor, menjadi tidak efektif ketika permintaan ekspor minyak sawit melemah, terutama karena dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar global. (*)



Indonesia dan Rusia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Antarparlemen

Pada pertengahan Maret 2024, saat menghadiri Pemilu Presiden (Pilpres) Rusia sebagai pemantau internasional, delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Majelis Federal Rusia, Konstantin Kosachev, di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas isu-isu terkini dan bersepakat untuk memperkuat kerja sama antarparlemen di berbagai sektor.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, juga melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Majelis Federal Rusia Konstantin Kosachev.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)





Wakil Ketua Majelis Federal Rusia Konstantin Kosachev bersama delegasi DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Nono Sampono menyatakan, “Kita bersepakat bahwa kerja sama antarpemerintah dapat meningkatkan hubungan bilateral RI-Rusia. Kami berharap kerja sama ini akan terus bertambah, memperdalam hubungan baik antara kedua negara.” Dia menekankan bahwa perdagangan antara Indonesia dan Rusia telah berkembang pesat, mencatat peningkatan hampir 70% pada tahun 2022, dengan harapan mencapai target 5 miliar USD pada tahun 2024.

Pembicaraan juga mencakup investasi Rusia di Ibu Kota Nusantara (IKN) Indonesia, yang sedang dikembangkan sebagai *smart city*, serta kerja sama di bidang energi nuklir dan antariksa. Indonesia tertarik pada teknologi pem-

angkit listrik terapung dengan kapasitas 100-110 MW dan pembangunan stasiun antariksa, termasuk rencana pelatihan kosmonot Indonesia.

Nono menegaskan bahwa para senator memiliki peran penting dalam menghubungkan kerja sama bilateral dengan pemerintah daerah. Contohnya adalah kunjungan kepala perwakilan perdagangan Rusia ke Jawa Timur pada Juli 2023, yang menghasilkan pembicaraan bisnis di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pupuk, produk perikanan, makanan, fashion, bahan bangunan, dan logistik.

Dalam pertemuan itu, disoroti bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia akan segera mencapai

75 tahun. Rusia menganggap Indonesia sebagai mitra prioritas, mengingat hubungan yang terus berkembang dan sangat dinamis. Nono menambahkan, “Kami senang kembali ke sini, dan berharap kerja sama antarpemerintah ini dapat lebih membuka hubungan baik antar kedua negara.” Kata Nono.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh rombongan DPD RI lainnya, termasuk Senator Adilla Azis dari Jawa Timur, Abdullah Puteh dari Aceh, Darmansyah dari Bangka Belitung, Filep Wamafma dari Papua, Bambang Santoso dari Bali, dan Wakil Dubes RI Berlian Helmi, serta Liliana Gumerova, Ketua Bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, dan Kebudayaan Majelis Federal Federasi Rusia. (*)

Mudik Lebaran 2024: Fahira Optimis Berjalan Lancar

Arus mudik Lebaran 2024 diperkirakan akan meningkat hingga 70 persen, namun Fahira Idris, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, optimis bahwa situasi tersebut dapat diatasi dengan lancar berkat perencanaan dan persiapan matang oleh instansi terkait, termasuk Polri dan Kementerian Perhubungan.

Fahira menekankan pentingnya skema 4K—kesiapan dan kesediaan infrastruktur jalan, manajemen lalu lintas, regulasi, serta koordinasi dan kolaborasi—untuk menjamin kelancaran arus mudik. Pemerintah, menurut Fahira, telah mengambil langkah-langkah penting, termasuk rapat koordinasi antara Korlantas Polri, Ke-



Antrean kendaraan roda empat memadati area Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten saat arus mudik Lebaran 2023. (Foto Kompas)

menhub, Kementerian PUPR, Jasa Raharja, dan Badan Pengatur Jalan Tol, untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan manajemen lalu lintas.

“Infrastruktur jalan, termasuk jalan tol dan umum, sudah dalam kondisi baik dan siap untuk mendukung kelancaran mudik. Inisiatif seperti sistem satu arah, *contra flow*, ganjil genap, dan pembatasan kendaraan pengangkut logistik telah terbukti efektif dalam mengatasi kemacetan pada Lebaran tahun sebelumnya,” ujar Fahira.

Kebijakan seperti memajukan dan memperpanjang cuti bersama juga dianggap efektif

dalam mengurangi kemacetan. Fahira mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing untuk menjamin kelancaran mudik, serta mengimbau pemudik untuk tertib dan disiplin mengikuti petunjuk petugas.

Fahira juga mengadvokasi penggunaan program Mudik Angkutan Motor Gratis (Motis) oleh pemudik yang menggunakan sepeda motor, sebagai upaya mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Program Motis, yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN, dan swasta, memfasilitasi pemudik untuk menggunakan angkutan umum, sementara sepeda motor mereka diangkut ke tujuan, memungkinkan pemudik menggunakan kendaraan mereka di kampung halaman. (*)

Anggota DPD RI Fahira Idris
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Buka Bersama Senator Terpilih:

LaNyalla Sampaikan Upaya Penguatan DPD RI

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, baru-baru ini berbuka puasa bersama dengan senator-senator muda terpilih dari Pemilu 14 Februari 2024 di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, LaNyalla menekankan pentingnya memperkuat sistem bernegara dan lembaga DPD RI melalui lima proposal kenegaraan, yang ditujukan untuk membentuk kesadaran kolektif dan konsensus nasional.

LaNyalla menyinggung pernyataan Prof. Kaelan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menggambarkan DPD RI sebagai “pupuk bawang” yang hanya berfungsi sebagai pelengkap DPR RI, mengindikasikan adanya ketimpangan politik. Menurutnya, penguatan peran DPD RI sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

LaNyalla mengungkapkan bahwa lima proposal kenegaraan DPD RI bermula dari pengamatan ketidakadilan dan kemiskinan struktural, yang dianggap berasal dari perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 yang mengesampingkan Pancasila. “Salah satu usulan krusial adalah memberikan kesempatan kepada individu non-partisan untuk menjadi



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama calon senator terpilih Alfiansyah Komeng Bustami (Jabar), Aanya Rina Casmayanti (Jabar), Agita Nurfianti (Jabar), Cerint Iralloza Tasya (Sumbar), Imral Adenansi (Sumbar), M Rifki Farabi (NTB), Mirah Midadan (NTB), Laode Umar Bonte (Sultra) dan Achmad Azran (DKI Jakarta). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

anggota DPR RI, sesuai dengan tren global seperti di Afrika Selatan,” sebut LaNyalla Jumat (22/3/2024).

Dalam pembahasan lain, LaNyalla membandingkan sistem senator Amerika dengan Indonesia, menyatakan bahwa Amerika memiliki sistem bikameral kuat di mana Senat memiliki kekuasaan signifikan, termasuk dalam pemakzulan presiden. Sementara di Indonesia, peran DPD RI terbatas dan keputusan akhir berada pada DPR RI dan Presiden.

LaNyalla juga menyampaikan bahwa ia telah berusaha melakukan terobosan dengan memfasilitasi pertemuan antara *stakeholder* dae-

rah dan pembuat kebijakan untuk mempercepat penyelesaian masalah di lapangan, seraya melaporkannya langsung ke Presiden.

Sebagai solusi, LaNyalla mengusulkan agar Indonesia kembali ke UUD 1945 asli sebelum amendemen 1999-2002, dengan addendum untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan seperti yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru, dan sekaligus membuka peluang bagi peserta pemilu perseorangan untuk membentuk sistem *checks and balances* dalam penyusunan UU, mengakomodasi semangat reformasi dan perubahan global. (*)



Belajar Kepariwisataan, Komite III DPD RI ke Yunani



Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dipimpin ketuanya Hasan Basri, melakukan kunjungan referensi ke Yunani untuk menguatkan konsep RUU Perubahan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Mereka bertemu dengan pejabat tinggi Yunani pada 20-21 Maret 2024 untuk menggalikan praktik terbaik pariwisata berkelanjutan.

Rombongan Komite III DPD RI bersama Pimpinan Komite Produksi dan Perdagangan Parlemen Yunani. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menyerahkan cendera mata kepada Direktur Jenderal Kebijakan Kepariwisata Kementerian Pariwisata Yunani Panagiota Dionysopoulou. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Delegasi Indonesia berdialog dengan Direktur Jenderal Kebijakan Kepariwisata Yunani Panagiota Dionysopoulou dan anggota Parlemen Hellenik (Komite Produksi dan Perdagangan), mengeksplorasi strategi pengembangan pariwisata Yunani yang terkenal. Fokus pertemuan adalah pada regulasi, prinsip, dan hambatan dalam pariwisata berkelanjutan.

Kunjungan ini bertujuan memperoleh wawasan untuk memperkaya RUU Perubahan UU Kepariwisata Indonesia. Hasan Basri menekankan pentingnya membangun kerangka hukum yang mendukung sektor pariwisata Indonesia, mendorong investasi, dan melindungi kekayaan alam serta budaya.

Dalam pertemuan dengan

Komite Produksi dan Perdagangan Parlemen Yunani, Hasan Basri menyoroti persamaan karakteristik kepariwisataan antara Indonesia dan Yunani. “Keduanya memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang menjadi daya tarik wisata,” kata Hasan, anggota DPD RI dari Kalimantan Utara tersebut.

Indonesia bertekad mempelajari pengelolaan destinasi wisata bersejarah Yunani, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penggunaan teknologi untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Hal ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing nasional di pasar global.

Kedua negara, yang telah memiliki kerjasama di sektor pariwisata sejak 2007, kini berusaha meningkatkan

kolaborasi tersebut. Tujuannya adalah memajukan pariwisata melalui implementasi kesepakatan bilateral yang telah diratifikasi.

Delegasi Komite III DPD RI terdiri dari anggota dari berbagai provinsi Indonesia, menandakan pentingnya misi ini untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di tingkat nasional. Mereka adalah Hasan Basri (Kaltara), Yance Samonsabra (Papua Barat), Habib Said Abdurrahman (Kalteng) AA Oni Suwarnan (Jabar), M Sum Indra (Jambi), Hafidh Asrom (DIY), Dailami Firdaus (Jakarta), TGH. Ibnu Halil (NTB), Ajbar (Sulbar), Dedi Iskandar Batubara (Sumut), Ahmad Nawardi (Jatim), Zainal Arifin (Kaltim) dan Habib Zakaria Bahasyim (Kalsel). (*)

Pariwisata Indonesia Butuh Komitmen yang Jelas

Komite III DPD RI menyoroti pentingnya roadmap yang jelas dan komitmen pemerintah dalam mengembangkan pariwisata Indonesia, sektor yang krusial untuk ekonomi nasional. Wakil Ketua Komite III, Muslim M Yatim, menekankan pariwisata sebagai katalis utama peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Muslim menguraikan tujuh tantangan utama yang dihadapi industri pariwisata, termasuk isu lingkungan, tata kelola, layanan, sumber daya manusia, aksesibilitas, investasi, dan kesiapsiagaan bencana.

“Ketujuh isu tersebut men-

jadi tantangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan sektor pariwisata untuk menangannya,” ujar Muslim M Yatim pada RDPU Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/24).

Pada pertemuan yang sama, Ketua Asosiasi Dosen Pariwisata Indonesia Febby Dt Bangso menekankan perlunya memajukan wisata minat khusus dan memperkuat infrastruktur serta digitalisasi di sektor pariwisata. Heben Ezer dari ASTINDO menambahkan

tata kelola pariwisata yang baik menjadi esensial untuk memaksimalkan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi nasional.

Ezer menyerukan percepatan digitalisasi dan penguatan tata kelola untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Lily Amelia Salurapa dari DPD RI menuntut peningkatan manajemen pariwisata domestik, agar tidak kalah bersaing dengan destinasi luar negeri.

Diskusi ini menggarisbawahi urgensi pembaharuan dalam pengelolaan pariwisata Indonesia, mengingat potensi besar sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mempromosikan kearifan lokal. (*)



(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Temuan BPK RI Semester I Tahun 2023

BAP Dorong Pengembalian Kerugian Negara

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan rapat konsultasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (21/3/2024).

Rapat konsultasi tersebut merupakan pelaksanaan tugas BAP DPD RI sesuai Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 118, yaitu melakukan penelaahan dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara yang disampaikan kepada DPD RI. BAP DPD RI melaksanakan tugas tersebut dengan mengidentifikasi kerugian daerah yang dijumpai dari hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan di daerah, terhadap entitas di pemerintah daerah, termasuk juga BUMD, bank daerah.

Ketua BAP DPD Tamsil Linrung menyebutkan ada beberapa kasus temuan BPK untuk segera dituntaskan. Misalnya, temuan BPK Sul-



Ketua BAP DPD Tamsil Linrung menyerahkan cenderamata kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Dadek Nandemar, usai menggelar rapat konsultasi. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

tra terkait dugaan korupsi kasus *illegal mining* di Blok Mandiodo, kasus Bandara di Kolaka Utara, kasus kelebihan bayar di beberapa proyek, maupun perjalanan dinas sejumlah daerah.

“Sejauh ini progresnya sudah bagus. Pihak bermasalah sudah mengakui dan kerugian negara akan dikembalikan. Prinsipnya, kami mendorong supaya kerugian daerah atau negara dikembalikan,” jelas Senator asal Sulawesi Selatan (Sulsel) tersebut usai pertemuan.

Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Dadek Nandemar menyambut baik kehadiran BAP DPD RI. Menurutnya, DPD RI ingin melihat sejauh mana keseriusan pihaknya

dalam menangani sejumlah kasus di Sultra.” Mereka (BAP DPD) hanya ingin mengetahui, sudah sejauh mana prosesnya. Mereka mengapresiasi yang kami lakukan terhadap temuan itu,” ujarnya.

Selain Tamsil Linrung, juga hadir sejumlah pimpinan dan anggota BAP DPD RI. Mereka adalah Bambang Santoso (Wakil Ketua BAP/Senator Provinsi Bali), Maya Rumantir (Senator Provinsi Sulut), Angelius Wake Kako (Provinsi NTT), Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Provinsi Sulbar), Mirati Dewaningsih (Provinsi Maluku), Alexander Fransiscus (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), dan Emma Yohanna (Provinsi Sumatera Barat). (*)

Banyak Potensi Daerah Belum Dipatenkan

Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang digagas oleh pemerintah, bertujuan untuk mengatur dan melindungi Sumber Daya Genetik (SDG) sebagai aset bangsa. Menurut Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Aji Mirni Mawarni, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Min Usihen, Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Suyud Margono, dan Pakar Hukum Universitas Indonesia Ranggalawe Suryasadin, Selasa (19/3/2024), RUU ini perlu melindungi potensi SDG di berbagai daerah. “RUU ini harus mengakomodir perlindungan terhadap potensi SDG di berbagai daerah sebagai kekayaan bangsa,” kata Aji Mirni dalam pertemuan tersebut.

Senator Marthin Billa menyoroti banyaknya potensi daerah dan pengetahuan tradisional yang belum terlindungi dalam hak paten, seperti 150 jenis tanaman tradisional. Revisi UU Paten diharapkan dapat mengakomodir perlindungan dan pendaftaran hak paten atas aset-aset tersebut. Selain itu, Senator Angelius Wake Kako menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya paten



Pimpinan dan anggota Komite II DPD RI bersama pakar usai RDPU membahas RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah.

Min Usihen menjelaskan, revisi UU Paten diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional, dengan tujuan meningkatkan perlindungan paten yang inovatif dan responsif. Revisi ini diharapkan dapat mendukung inovasi dan perlindungan karya bangsa, serta mendorong stakeholder untuk merangsang inovasi baru.

Ahmad M Ramli, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, menggarisbawahi bahwa revisi UU Paten harus berkontribusi pada peningkatan inovasi dan perlindungan karya bangsa. Revisi tersebut juga harus memudahkan pemerintah daerah dalam memfasili-

tasi pengembangan penemuan melalui APBD.

“Saya setuju sekali untuk memasukkan bagian seperti di UU Hak Cipta. Misalnya untuk mendukung pengembangan penemuan di negara ini, pemerintah daerah dapat memfasilitasi. Dengan ada kata-kata itu, maka pemda bisa mencantumkan dalam APBD,” kata Ramli.

Namun, Senator Teras Narang mengingatkan bahwa revisi UU Paten harus dapat mengatasi permasalahan birokrasi dan prosedur yang rumit dalam pendaftaran hak paten. Masalah ini selama ini membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkan karyanya, sehingga revisi diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pendaftaran hak paten. (*)



Dalami RUU RPJPN 2025-2045 Komite IV Raker dengan Bappenas



Ketua Komite IV DPD RI Amang Syafruddin dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menandatangani kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, untuk mendalami RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ketua Komite IV DPD RI Amang Syafruddin, menyoroti beberapa permasalahan terkait RUU RPJPN 2025-2045. Pertama, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kedua, ada tantangan berupa pergeseran demografi. “Kami memandang perlu mendapatkan informasi mengenai tantangan global, nasional, dan lokal dalam pe-

rumusan dan pembahasan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 ini,” ujar Amang dalam raker yang berlangsung belum lama ini.

Senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara, M Amirul Tamim, mempertanyakan apakah RPJPN 2025-2045 akan menjadi panduan dan mengikat semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan, mengingat RPJPN 2005-2025 tidak memuat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), namun pemerintah tetap melaksanakannya.

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Evi Zainal Abidin, menyoroti sistem zonasi untuk masuk sekolah selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, menilai kebijakan tersebut baik namun implementasinya di daerah masih kurang.

Senator dari Provinsi Bengkulu, Riri Damayanti

John Latief, menanyakan tentang kontrol program pencegahan *stunting* yang dijalankan oleh berbagai kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah. Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Tengah, Yustina Ismiati, menegaskan bahwa *stunting* membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat.

Senator dari Provinsi Sulawesi Utara, Maya Rumantir, menambahkan tentang pentingnya menyiapkan generasi emas untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa RUU RPJPN disusun untuk menyinkronkan RPJPN dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sesuai mandat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (*)

Gede Ngurah Ambara Putra Gantikan Arya Wedakarna



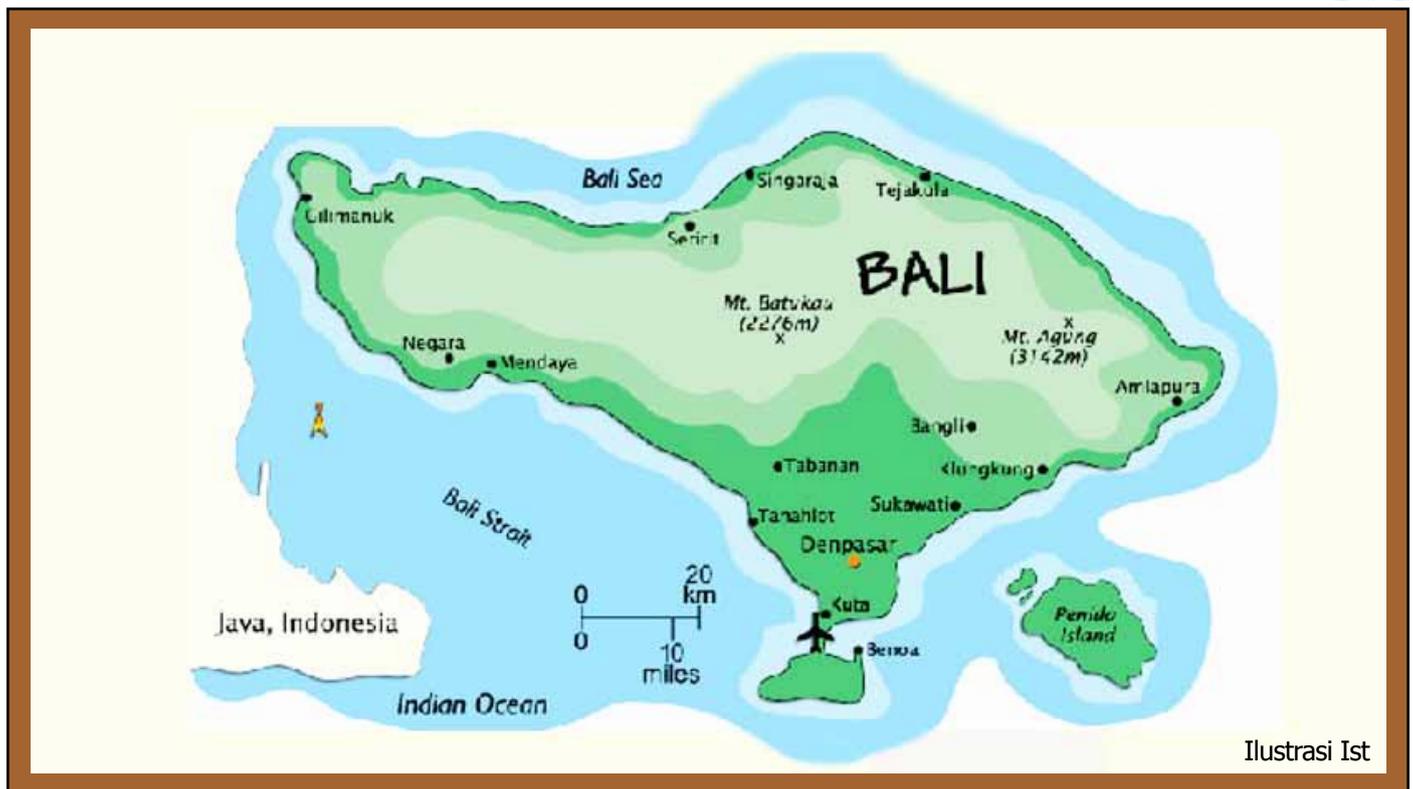
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono sedang mengambil sumpah jabatan Gede Ngurah Ambara Putra sebagai anggota DPD RI Penggantian Antar Waktu (PAW). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono melantik Gede Ngurah Ambara Putra menggantikan Shri IGN Arya Wedakarna (AWK) sebagai anggota DPD RI Penggantian Antar Waktu

(PAW) sisa Masa Jabatan 2019-2024, dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 DPD RI, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (28/3/2024).

“Kami ucapkan selamat bergabung, membawa ser-

ta memperjuangkan aspirasi daerah khususnya di provinsi Bali, serta memperkuat perjuangan DPD RI dalam membangun daerah,” pesan Nono Sampono dalam amanat pelantikannya pada sidang paripurna luar biasa tersebut.



Ngurah Ambara Putra dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan tahun 2019-2024. Pada Pemilu 2019, Ngurah Ambara Putra meraih suara terbanyak kelima di Provinsi Bali, dengan 120.428 suara.

Sedangkan AWK diberhentikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 35/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Pemberhentian AWK diusulkan oleh Pimpinan DPD RI ke Presiden RI, berdasarkan Keputusan Badan Kehor-

matan (BK) DPD RI bahwa AWK terbukti telah melanggar kode etik sebagai anggota DPD RI, sebagaimana diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Pelanggaran kode etik yang dimaksud, yaitu AWK melontarkan pernyataan bernada SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Sementara itu, Gede Ngurah Ambara Putra yang ditemui usai dilantik mengatakan, bahwa dirinya sebagai anggota DPD RI asal Bali sisa masa jabatan 2019-2024, akan mendorong potensi yang dimiliki Provinsi Bali dalam meningkatkan devisa negara, utamanya dalam bidang pariwisata dan bidang lainnya.

“Tentunya, melalui aspirasi yang saya bawa sebagai perwakilan Bali, saya akan terus mendorong kekuatan pariwisata Bali agar mampu menyumbang devisa bagi negara dan

mendorong stimulus ekonomi di sana,” pungkas Gede Ngurah Ambara.

Profil Singkat Ngurah Ambara

Gede Ngurah Ambara Putra, lahir pada 28 Mei 1967 di Denpasar, adalah alumnus SMA Negeri 1 Denpasar (1986) dan Universitas Satya Dwipayana Jakarta (2008-2011). Dalam Pemilu 2019, ia menduduki posisi kelima dengan 120.428 suara untuk DPD RI dari Bali. Pada 2020, Ngurah Ambara, berpasangan dengan Made Bagus Kertha Negara, kalah dalam Pilkada Denpasar dengan 18,8% suara, di bawah I Gusti Ngurah Jaya Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa yang menang dengan 81,2%. Dalam Pemilu 2024, Ambara gagal terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra, yang hanya mengutus I Dewa Gde Agung Widiarsana dari Bali dengan 80.658 suara. (*)

Komite II DPD RI ke Gresik untuk Pengawasan Pelaksanaan UU Minerba



Sejumlah Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI berpose di depan smelter tembaga pertama di Indonesia yang ada di Gresik, Jawa Timur. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik pada Senin (25/3/2024) untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Minerba. Kunjungan ini diawali dengan peninjauan lapangan ke PT Smelting, smelter tembaga pertama di Indonesia, dan dilanjutkan dengan diskusi di Kantor Bupati Gresik bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin, menyatakan kunjungan kerja di Gresik dilakukan karena kabupaten ini merupakan sentra utama program hilirisasi sektor pertambangan. Menurut Bustami, ini sejalan dengan semangat UU

Minerba yang menekankan pada hilirisasi sektor pertambangan di Indonesia.

Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah, menekankan pentingnya kunjungan kerja ini dalam rangka pengawasan UU Minerba. Ia menyebut bahwa pengawasan ini penting untuk memahami situasi terkini program hilirisasi pertambangan mineral dan batu bara di tingkat daerah dan nasional.

Dalam diskusi yang dipimpin oleh Bustami Zainudin, para peserta dari berbagai tingkatan pemerintahan dan LSM menyampaikan berbagai permasalahan dan masukan. Isu yang dibahas meliputi infrastruktur daerah, dampak lingkungan, perizinan, dan rendahnya pemanfaatan dolomit di Kabupaten Gresik.

Perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Perindustrian menjawab masalah yang diangkat. Mereka mendiskusikan solusi, termasuk peningkatan dukungan untuk SDM, perizinan, dan infrastruktur pendukung hilirisasi pertambangan.

Kunjungan kerja ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh Bustami Zainudin, yang menegaskan bahwa semua masukan akan dicatat sebagai hasil pengawasan. Komite II DPD RI berkomitmen memperjuangkan pelaksanaan UU Minerba, khususnya hilirisasi sektor pertambangan untuk optimal memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. (*)



Sekjen DPD RI Lantik 96 PPPK



Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Deputy Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputy Bidang Persidangan Oni Choiruddin, ketika melantik PPPK dan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Setjen DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Rahman Hadi melantik 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Mereka yang dilantik tersebut bertugas di Kantor DPD RI Pusat dan di Kantor Perwakilan DPD RI di ibu kota provinsi.

Selain melantik PPPK, pada kesempatan tersebut Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga melantik sejumlah pejabat struktural, baik yang dirotasi maupun promosi, serta pejabat fungsional, yang selama ini sudah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI.

Dalam sambutannya, Rahman Hadi berpesan kepada mereka yang baru saja dilantik terse-

but, baik bagi PPPK maupun pejabat struktural dan fungsional agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab yang diberikan, serta menjaga integritas sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Saya mengharapkan yang baru saja dilantik dan mengucapkan sumpah janji hari ini dapat semakin termotivasi, menciptakan ide baru, dan melakukan kerja-kerja profesional serta kolaborasi dalam mewujudkan kinerja Setjen DPD RI yang memiliki *core values* Ber-Akhlak,” pesan Rahman Hadi didampingi Deputy Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputy Bidang Persidangan Oni Choiruddin.

Rahman Hadi menambahkan, bagi pegawai yang bertugas di Kantor DPD RI di ibu

kota provinsi untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan layanan kinerja, baik bagi anggota DPD RI dan kesekretariatan DPD RI. “Saya harapkan pelayanan di Kantor DPD RI di ibu kota provinsi terus meningkat dan memberikan kinerja optimal bagi yang terhormat anggota dewan perwakilan daerah,” pungkasnya.

Khusus bagi mereka yang dilantik sebagai pejabat struktural, Rahman Hadi menyebutkan bahwa rotasi dan mutasi jabatan adalah hal yang biasa bagi seorang ASN. Rotasi dan mutasi itu dalam pengembangan karir bagi seorang ASN, untuk mendukung kesinambungan program dan mencapai target kinerja yang ditetapkan. (*)

(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama sejumlah anggota DPD RI dalam kegiatan berbuka puasa bersama di kediaman Ketua DPD RI, di Jakarta, Sabtu (30/3/2024).
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama empat calon anggota DPD RI terpilih dari Papua Pegunungan dan dua orang dari Maluku Utara, dalam kegiatan buka puasa di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Senin (25/3/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin menyaksikan penandatanganan berita acara pelantik pejabatan struktural dan fungsional serta PPPK di lingkungan Setjen DPD RI.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Alqur'an dan Memperbarui Paradigma Umat

Oleh:

Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A/Anggota DPD RI asal DIY

Nuzulul Qur'an, yang merujuk pada peristiwa turunnya Al-Qur'an, merupakan momen penting dalam kalender Islam, terutama di bulan Ramadhan. Ini dianggap sebagai waktu ketika umat Islam di seluruh dunia merenungkan pentingnya Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan. Peringatan tahunan ini menawarkan kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai yang diajarkan dalam kitab suci ini.

Al-Qur'an, teks yang telah bertahan lebih dari 1400 tahun, dikenal dengan keotentikannya yang terjaga. Ini menunjukkan keunikan Al-Qur'an

sebagai mukjizat yang terus ada, tidak seperti mukjizat lain yang berakhir bersama wafatnya rasul. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolektif untuk memperbarui cara umat Islam memandang dan berinteraksi dengan Al-Qur'an.

Perubahan paradigma dalam pemaknaan Al-Qur'an menuntut penyesuaian dengan konteks peradaban manusia saat ini. Pendekatan ini memungkinkan Al-Qur'an untuk tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus mempertahankan kemurnian spiritual bagi pengikutnya.

Al-Qur'an tidak hanya dilihat sebagai

kalamullah (firman Tuhan) atau kitabullah (buku Tuhan), tetapi juga sebagai kitabul insan (buku umat manusia). Ini menegaskan peran Al-Qur'an sebagai panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bagaimana teks ini dapat memberikan arahan dan pembersihan jiwa.

Kebersihan fisik dan spiritual dianggap penting dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Hal ini menggarisbawahi keyakinan bahwa kesucian Al-Qur'an dapat mempengaruhi dan membersihkan jiwa manusia yang mendalaminya.

Di era modern, di mana banyak tantangan dan distraksi, umat Islam diingatkan untuk terus memperbarui komitmen mereka terhadap Al-Qur'an. Ini berarti Al-Qur'an tidak hanya diperingati dalam acara tahunan, tetapi juga diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Penting untuk mencari pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Qur'an, terutama ketika menghadapi ketidakjelasan atau pertanyaan.



Sikap proaktif dalam belajar dan memahami Al-Qur'an membantu menjaga kedekatan dengan ajaran-ajarannya.

Al-Qur'an dianggap sebagai sumber jawaban atas berbagai persoalan kehidupan. Oleh karena itu, menjauhkan diri dari Al-Qur'an dianggap sebagai menjauhkan diri dari

solusi atas masalah tersebut, sementara mendekatinya berarti menemukan jalan untuk selamat.

Peringatan Nuzulul Qur'an memiliki karakteristik khusus di Indonesia, di mana perayaannya dilakukan dengan semarak, tidak seperti di negara lain, termasuk negara-negara

Arab. Hanya di Malaysia dan Brunei Darussalam, peringatan serupa diadakan, tetapi tidak seintensif di Indonesia.

Tradisi memperingati Nuzulul Qur'an pada tanggal 17 Ramadhan di Indonesia adalah hasil ijtihad Presiden Soekarno. Keputusan ini bukan hanya merujuk pada signifikansi



Ilustrasi st

spiritual tetapi juga terkait dengan simbolisme nasional, mengaitkan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus.

Kesadaran ini menuntut umat Islam, terutama di Indonesia, untuk memahami nilai dan makna peringatan Nuzulul Qur'an, menjadikannya lebih dari

sekadar ritual tahunan, namun sebagai refleksi atas peran Al-Qur'an dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, Nuzulul Qur'an tidak hanya merupakan peristiwa sejarah atau tradisi, tetapi juga menjadi titik fokus bagi pembaruan spiritual dan keterlibatan yang lebih dalam dengan ajar-

an Al-Qur'an. Ini menekankan pentingnya Al-Qur'an dalam memberikan panduan, kekuatan, dan inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia.

(* /Artikel ini disarikan dari ceramah beliau pada acara Nuzulul Quran di Masjid Muslimat, Krpyak Kulon, Bantul, DIY, pada hari Rabu, 27 Maret 2024).



1 Masjid Istiqlal, Jakarta:

Masjid terbesar di Asia Tenggara ini, dengan arsitektur modern yang mengagumkan, menjadi destinasi wajib saat Idulfitri. Masjid Istiqlal menyimbolkan kebebasan dan kemerdekaan Indonesia, menawarkan pengalaman spiritual yang mendalam dengan suasana yang megah dan sakral.



(Foto Wikipedia.com)

The largest mosque in Southeast Asia, with its stunning modern architecture, is a must-visit during Eid. The Istiqlal Mosque symbolizes the freedom and independence of Indonesia, offering a profound spiritual experience with its majestic and sacred ambiance.

Empat Destinasi Religi Menarik untuk Dikunjungi Saat Lebaran

Four Interesting Religious Destinations to Visit During Eid

Lebaran di Indonesia menjadi waktu yang tepat untuk mengunjungi sejumlah destinasi menarik untuk dikunjungi saat libur Idulfitri. Berikut empat tempat religi yang direkomendasikan untuk Anda kunjungi bersama keluarga.

Eid al-Fitr or simply known "Eid" in Indonesia is the perfect time to visit several interesting destinations. Here are four recommended religious places for you to visit with your family.

2 Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah:

Candi Buddha terbesar di dunia ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan saat matahari terbit. Meskipun bukan destinasi religi Islam, Borobudur menjadi lokasi yang dikunjungi banyak wisatawan, termasuk umat Islam yang merayakan Lebaran, untuk merenung dan menikmati keindahan arsitektur serta reliefnya yang mengagumkan.



(Foto Indonesia Travel)

The largest Buddhist temple in the world offers an astonishing view at sunrise. Although it is not an Islamic religious destination, Borobudur is visited by many tourists, including Muslims celebrating Eid, to reflect and enjoy its stunning architecture and impressive reliefs.

3 Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh:

Masjid bersejarah ini merupakan symbol ketahanan dan kekuatan masyarakat Aceh pasca tsunami 2004. Dengan arsitektur yang memadukan gaya Mughal dan kolonial Belanda, masjid ini menampilkan keindahan yang menenangkan, ideal untuk refleksi dan ibadah di hari Lebaran.



This historical mosque stands as a symbol of the resilience and strength of the Acehnese people after the 2004 tsunami. With architecture that blends Mughal and Dutch colonial styles, the mosque offers a serene beauty, ideal for reflection and worship during Eid.

4 Makam Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur:

Sebagai salah satu dari Wali Songo, Sunan Ampel berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Makam ini menjadi tempat ziarah populer, terutama saat Lebaran, di mana pengunjung datang untuk berdoa dan mengenang jasa Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia

As one of the Wali Songo or nine guardians, Sunan Ampel played a crucial role in spreading Islam in Java. His tomb is a popular pilgrimage site, especially during Eid, where visitors come to pray and commemorate Sunan Ampel's contributions to the spread of Islam in Indonesia.





**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

*Selamat Hari Raya
Idul Fitri*
1 Syawal 1445 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

